

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan pemulung di Kota Tasikmalaya dan bagaimana upaya pemerintah Kota Tasikmalaya dalam melakukan pemenuhan hak-hak pemulung. Kompleksitas permasalahan pada pemulung tidak bisa diselesaikan begitu saja, terutama pada aspek pemenuhan hak sosial dan politiknya. Faktor tersebut menyebabkan lahirnya Paguyuban Pemulung Tasikmalaya (PPT). Stereotip pemerintah terhadap pemulung sering dipandang sebelah mata karena dianggap kotor, dekat dengan penyakit, berpendapatan rendah, dan pemulung sering dianggap sebagai pelaku pencurian. Pemulung merupakan warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Sosial dalam menjamin pemenuhan hak-hak pemulung melalui penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam implementasinya belum dilakukan secara optimal dibuktikan dari jumlah pemulung di Kota Tasikmalaya yang masih tinggi. Pada bidang pemenuhan hak politik pemulung mengalami kendala teknis administratif. Terutama ketika seorang pemulung tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka untuk melakukan akses pelayanan hak politiknya tidak akan bisa. Keberadaan pemulung yang apatis terhadap Pemerintah tentu akan semakin berpeluang menyumbang potensi angka golput. Sementara disisi lain data kependudukan menjadi instrumen yuridis penggunaan jaminan pemenuhan hak sosial dan politik bagi pemulung di Kota Tasikmalaya. Negara harus hadir memenuhi hak sosial dan politik pemulung melalui Dinas Sosial, KPU, dan masyarakat. Tetapi pada interaksi tersebut pemulung sering di pandang sebelah mata sehingga masih terdapat sebagian dari mereka yang tidak terpenuhi hak sosial dan politiknya.

Kata kunci: Hak Sosial dan Politik, Kewarganegaraan, Demokrasi

ABSTRACT

This research discusses the problems of waste pickers in Tasikmalaya City and how the Tasikmalaya City government's efforts to fulfill the rights of waste pickers. The complexity of the problems of waste pickers cannot be solved simply, especially in the aspect of fulfilling their social and political rights. This factor led to the birth of the Tasikmalaya Scavenger Association (PPT). The government's stereotype of waste pickers is often underestimated because they are considered dirty, close to diseases, low-income, and waste pickers are often considered as perpetrators of theft. Scavengers are citizens who have equal status in the eyes of the law and the government. This is in accordance with Article 27 of the 1945 Constitution, which states that all citizens shall be equal before the law and government and shall uphold the law and government with no exceptions.

The results of this study found that the Tasikmalaya City Government through the Social Service in ensuring the fulfillment of the rights of scavengers through the handling of Persons with Social Welfare Problems (PMKS). The implementation has not been done optimally as evidenced by the high number of waste pickers in Tasikmalaya City. In the field of political rights fulfillment, scavengers experience administrative technical obstacles. Especially when a scavenger does not have an Identity Card (KTP), they will not be able to access political rights services. The existence of waste pickers who are apathetic towards the government will certainly be more likely to contribute to the potential abstention rate. On the other hand, population data is a juridical instrument to use to guarantee the fulfillment of social and political rights for waste pickers in Tasikmalaya City. The state must be present to fulfill the social and political rights of waste pickers through the Social Service, KPU, and the community. But in this interaction, waste pickers are often underestimated so that there are still some of them who are not fulfilled their social and political rights.

Keywords: Social and Political Rights, Citizenship, Democracy